

Efektivitas Penggunaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Program KOTAKU dalam Mendukung Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi

Noor Seto Dhona Ananta, Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky



Noor Seto Dhona Ananta¹, Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky; ¹ Konsultan Pemberdayaan, Jl. Ir. Juanda No. 116 Tisnonegaran, Kota Probolinggo, 67211, Jawa Timur. ² Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng No. 62-64, Klojen, Kota Malang, 65146, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2021-01-05

Received in revised form 2021-01-08

Accepted 2021-02-18

Kata kunci:

Bantuan Pemerintah,
Inovasi Daerah,
Pembangunan
Berkelanjutan.

Keywords:

Government Assistance,
Regional Innovation,
Sustainable Development.

How to cite item:

Noor Seto Dhona Ananta,
Edi Subiyantoro, Maxion
Sumtaky. (2021).
Efektivitas Penggunaan
Bantuan Pemerintah untuk
Masyarakat Program
KOTAKU dalam
Mendukung Inovasi
Daerah Kabupaten
Banyuwangi.
*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 2(1).

Abstrak

Pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, sehingga pola pembangunan yang bersifat top down masih banyak terjadi di beberapa daerah. Pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang tidak efektif juga menghambat perkembangan inovasi daerah. Maka dari itu, perlu dideskripsikan maksud dari inovasi daerah, mengevaluasi keterkaitan bantuan pemerintah dalam mendukung inovasi daerah, serta menganalisis efektivitas penggunaannya. Metode analisa yang digunakan dengan metode analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa peran kepala daerah sangat mempengaruhi perwujudan inovasi daerah, penggunaan bantuan pemerintah menjadi efektif dengan adanya peran civil society. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai dengan adanya kolaborasi dari semua pihak.

Abstract

Achieving the sustainable development goals does not appropriate as expected. Top down development method still occur in several regions. The ineffective use of government aid funds also hinders the development of regional innovation. Therefore, it is necessary to describe the purpose of regional innovation, the relevance of government assistance in supporting regional innovation, and analyze the effectiveness of its use. The method of analysis used is descriptive analysis. The results show that the role of regional heads greatly influences the realization of regional innovation, the use of government assistance becomes effective with the role of civil society. Based on this, sustainable goals can be achieved through collaborative development from all parties.

1. Pendahuluan

Melanjutkan program *Millenium Development Goals* (MDG's), kini negara menyoroti program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang lebih mengedepankan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan capaian SDG's diantaranya yang ditonjolkan merupakan program peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta pembangunan kota yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan beberapa poin *Sustainable Development Goals*, peran inovasi daerah sangat berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan. Setiap pemimpin daerah berlomba-lomba mendukung mewujudkan tujuan pemerintah tersebut. Inovasi daerah mendorong pemimpin daerah untuk melakukan terobosan-terobosan baru agar dapat menunjukkan bahwa daerah yang dipimpinnya dapat mandiri dan tahan terhadap gejolak perubahan ekonomi dan sosial. Pemimpin daerah juga menunjukkan bahwa potensi yang ada di wilayahnya dapat dikelola dengan baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Pada tahun 2019, Kabupaten Banyuwangi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) senilai 27,5 Miliar rupiah untuk 19 Desa/Kelurahan. Nilai ini merupakan yang terbesar dibandingkan Kota/Kabupaten lain di Jawa Timur. Bantuan tersebut tidak turun begitu saja, melainkan ada proses penggalian informasi dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan di tingkat bawah. Hasil dari penggalian informasi kemudian dipetakan dan diajukan dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, hingga terbitlah pengesahan melalui Surat Keputusan Bupati. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota inilah suatu daerah mendapatkan bantuan melalui Program KOTAKU. Mengelola dana bantuan yang cukup besar tentunya membawa tanggung jawab yang besar pula bagi masyarakat dan kepala daerah yang mengesahkan Surat Keputusan tersebut. Beberapa daerah masih menganut gaya otoriter dengan pola pembangunan *top down*, melakukan pembangunan tanpa memahami kebutuhan masyarakat. Namun juga tidak sedikit yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam mengelola wilayahnya. Pola lama penentuan kebijakan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) masih cenderung mengacu pada keberhasilan instansinya masing-masing. Namun yang diharapkan dalam

perwujudan SDG's di masa sekarang ini adalah pembangunan yang saling terintegrasi antar instansi, sehingga permasalahan daerah dapat diatasi bersama. Tidak ada tumpang tindih kegiatan, sehingga dapat mengoptimalkan anggaran pengeluaran daerah.

Kondisi di atas melatarbelakangi penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penggunaan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) Program KOTAKU dalam mendukung inovasi daerah Kabupaten Banyuwangi.

2. Landasan Teori

Konsep *civil society* saat ini menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara yang demokratis, setiap kegiatan pembangunan banyak melibatkan kelompok masyarakat untuk membina partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemberian ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pembangunan. Pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat, tentunya akan berdampak positif bagi keberlanjutan dan pengembangan daerah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Tabrani Z. A (2016) bahwa konsep *civil society* merupakan konsep yang bagus dalam merangkai keberagaman agama dan budaya, serta politik demokrasi Pancasila di Indonesia.

3. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini didasari pada pentingnya peranan modal sosial bagi pembangunan daerah. Menurut Prusak L (Field, 2010), modal sosial merupakan hubungan yang terjadi karena keterikatan kepercayaan, saling pengertian, dan nilai kebersamaan yang mengikat suatu kelompok untuk berbuat aksi bersama secara efektif dan efisien. Konsep modal sosial sangat erat kaitannya dengan dinamika demokrasi dalam *civil society*. Modal sosial menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang dalam hidup bermasyarakat, karena pada hakikatnya manusia membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitasnya. Parameter modal sosial menurut Kurniawan I. D (2018) antara lain kepercayaan (*trust*), norma (*norm*) dan jaringan (*networks*). Kepercayaan berfungsi untuk mereduksi bahaya dari

suatu aktivitas. Norma merupakan aturan bersama yang mengandung sanksi moral maupun fisik bagi setiap orang yang melanggar nilai sosial. Norma ini ditujukan untuk menekan setiap orang agar perilakunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang disepakati bersama (Setiadi dan Kolip, 2011). Menurut Robinson (2011), jaringan terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, hubungan genealogis, dan kesamaan kepercayaan politik atau agama. Pembentukan jaringan suatu masyarakat demi mendapatkan modal sosial perlu diorganisasikan dalam suatu institusi dengan perlakuan khusus.

Rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia melalui forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah merujuk pada pencapaian 17 tujuan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan tersebut antara lain *No Poverty* (Menghapus Kemiskinan), mengakhiri kemiskinan ekstrim, penduduk di bawah garis kemiskinan dengan daya beli kurang dari Rp 7.800 per hari. Mendapatkan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, agar dapat bertahan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial dan bencana. *Zero Hunger* (Mengakhiri Kelaparan), mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik serta mendukung pertanian berkelanjutan. Mengakhiri malnutrisi dan gizi buruk hingga penelantaran anak balita, dengan memberikan nutrisi yang baik pada remaja putri, ibu hamil dan menyusui, serta para manula.

Good Health and Well-Being (Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan), memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas, obat-obatan dan vaksin yang aman dan terjangkau bagi semua. *Quality Education* (Pendidikan Bermutu), memastikan pendidikan yang setara, dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Memberikan pendidikan primer dan sekunder bagi semua anak perempuan dan laki-laki secara gratis, setara, dan berkualitas.

Gender Equality (Kesetaraan Gender), mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dimana saja. Memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh untuk kepemimpinan di semua level pengambilan keputusan. *Clean Water and Sanitation* (Akses Air Bersih dan Sanitasi), memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang

berkelanjutan dan sanitasi untuk semua. Kebersihan yang layak dan adil untuk semua dengan mengakhiri buang air di tempat terbuka. Memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi dan pembuangan air limbah.

Affordable and Clean Energy (Energi Bersih dan Terjangkau), memastikan terjangkaunya akses energi yang dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita, meningkatkan produktivitas ekonomi disertai peningkatan mutu dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya. *Industry, Innovation, and Infrastructure* (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Menyediakan akses universal dan terjangkau terhadap internet di negara kurang berkembang.

Reduced Inequalities (Mengurangi Ketimpangan), mengurangi ketimpangan dalam negara maupun antar negara. Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum. *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Permukiman yang berkelanjutan), membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu permukiman kumuh. Menyediakan akses ruang publik yang aman, hijau, memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan manajemen limbah lainnya. *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab), memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam. *Climate Action* (Penanganan Perubahan Iklim), mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Memperkuat daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di semua negara.

Life Below Water (Menjaga Ekosistem Laut), mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, dan budidaya pariwisata perairan. *Life on Land* (Menjaga Ekosistem Darat), melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), menghambat dan membalikkan degradasi tanah, serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

Peace, Justice, and Strong Institutions (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat), mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif. *Partnerships for The Goals* (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan), memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, yang dibangun dari pengalaman dan strategi dalam bermitra. Kemitraan ini lebih dikenal dengan istilah kolaborasi antara pihak yang terkait. Mendukung kebijakan dan partisipasi yang berdampak sistemik dalam menangani permasalahan global.

Otonomi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah, mendukung terlaksananya pengembangan daerah sesuai dengan karakter wilayah masing-masing. Dalam mengusung otonomi daerah, peran kepala daerah sangat dibutuhkan agar pembangunan inovasi lebih terstruktur dan terarah. Aulia *et. al* (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemimpin daerah merupakan nahkoda yang mengarahkan organisasi menuju tujuan yang ditentukan, membangun hubungan yang baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Pemeriksaan keuangan menjadi poin penting dalam menilai efektivitas anggaran terhadap realisasi kegiatan pembangunan.

Kesesuaian pemanfaatan dana terhadap tujuan pembangunan juga berpengaruh terhadap pengembangan inovasi daerah yang diusung oleh setiap kepala daerah (Wati, 2015). Evaluasi secara periodik dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada periode sebelumnya. Penelitian Mirnasari (2013) mengemukakan bahwa inovasi dalam pelayanan publik merupakan pencapaian dalam meraih, memperbaiki, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dari hasil pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. Inovasi tersebut dilakukan diberbagai sektor pemerintahan, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, hingga pelayanan masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan yang berujung pada peningkatan perekonomian.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan melalui masing-masing kementerian. Hal ini untuk mendorong peningkatan perekonomian melalui berbagai sektor. Misalnya dari sektor pertanian melalui Kementerian Pertanian, pemerintah memberikan bantuan subsidi pupuk bagi kelompok tani. Kementerian Sosial juga meluncurkan bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin. Berbagai program pendidikan yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan juga memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah mengenyam pendidikan. Tidak ketinggalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga meluncurkan program - program bantuan padat karya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Seluruh bantuan pemerintah tersebut merupakan stimulan untuk mendongkrak peningkatan perekonomian masyarakat.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dinaungi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaannya, program KOTAKU mengacu pada Permen PU Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Adapun

indikator perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebut diatur dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Secara garis besar, Program KOTAKU menggalang partisipasi masyarakat untuk membangun infrastruktur secara padat karya. Tidak hanya partisipasi masyarakat, kolaborasi bersama pemerintah daerah juga ditekankan dengan azas Pemda sebagai nahkoda. Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan komitmen agar dalam pelaksanaan pencapaian SDG's tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh pihak. Program KOTAKU juga mendukung perwujudan beberapa poin tujuan SDG's, diantaranya adalah poin 9 dan 16 dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur, air bersih dan sanitasi. Dalam pelaksanaannya juga mendukung kesetaraan gender untuk membentuk kelembagaan yang kuat, dan menjalin kemitraan untuk mencapai tujuan, hal ini tercermin dalam poin 5, 16, dan 17. Selain itu, *outcome* yang ingin dicapai tentunya mengarah pada peningkatan perekonomian menuju kota berkelanjutan, seperti tertuang pada poin 8 dan 11 tujuan SDG's.

4. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa penelitian eksplanasi yang akan menganalisis efektivitas penggunaan dana BPM Program KOTAKU dalam mendukung inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Populasi pada penelitian ini sejumlah 19 desa/kelurahan penerima bantuan. Desa/kelurahan penerima dana BPM Program KOTAKU tersebut antara lain kelurahan Karangrejo, Penganjuran, Singonegaran, Singotrunan, Tukangkayu, Panderejo, Sumberrejo, Kebalenan, Pakis, Kampung Melayu, Mojopanggung, Penataban, Boyolangu, serta desa Blambangan, Kedungrejo, Kedungringin, Tembokrejo, Tambakrejo, Sumbersewu.

Dari 19 desa/kelurahan tersebut oleh peneliti dijadikan 4 cluster dengan metode area sampling berdasarkan karakteristik wilayahnya. *Cluster urban* mewakili wilayah perkotaan, antara lain kelurahan

Penganjuran, Singonegaran, Singotrunan, Tukangkayu, Panderejo, dan Kebalenan. *Cluster rural* mewakili wilayah pedesaan, antara lain desa Blambangan, Kedungrejo, Kedungringin, Tambakrejo, dan Sumbersewu. *Cluster plato* mewakili wilayah dataran tinggi, antara lain kelurahan Sumberrejo, Mojopanggung, Penataban, dan Boyolangu. *Cluster coast* mewakili wilayah pesisir pantai, antara lain kelurahan Karangrejo, Pakis, Kampung Melayu, dan desa Tembokrejo. Dari keempat *cluster* tersebut, peneliti menggunakan metode *random sampling* dalam menentukan sample di masing-masing *cluster*.

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif atas data yang diperoleh. Peneliti mendeskripsikan tentang inovasi daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, kemudian menganalisa keterkaitan pelaksanaan program KOTAKU dengan visi dan misi pembangunan di masing-masing daerah. Setelah itu, peneliti menganalisis efektivitas pelaksanaan program KOTAKU dengan melakukan perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi pemanfaatan yang telah dilaporkan pada program KOTAKU.

5. Hasil dan Pembahasan

Abdullah Azwar Anas sejak tahun 2010 dalam masa jabatannya hingga tahun 2020 dengan metode pemasaran yang *anti-mainstream*. Mengusung metode *tourism centered economy*, setiap dinas atau organisasi pemerintah daerah (OPD) di Banyuwangi adalah dinas pariwisata, dengan maksud segala program dinas diarahkan kepada peningkatan perekonomian berbasis wisata.

Metode pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang pertama adalah promosi dengan tidak berpromosi, tanpa melakukan promosi di luar daerah, setiap wisatawan, investor, *promotor event*, atau siapapun yang datang ke Banyuwangi diperlakukan secara istimewa. Dengan perlakuan istimewa tersebut, mereka merasakan kepuasan dan secara tidak langsung menceritakan kepuasannya di Banyuwangi kepada orang lain. Secara tidak langsung, promosi terjadi tanpa membuat promosi. Kedua, menjadi yang berbeda, bandara merupakan poin strategis dalam menarik wisatawan asing, namun dengan memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang

terbatas, tidak memungkinkan bagi Banyuwangi untuk bersaing dengan kota-kota besar lainnya.

Strategi yang diterapkan yakni dengan mengadopsi konsep bandara Koh Samui di Thailand membuat bandara di Banyuwangi, tepatnya di desa Blimbingsari kecamatan Blimbingsari menjadi *the first green airport* di Indonesia. Ketiga, destinasi tak terhalang akses, Banyuwangi mempunyai banyak destinasi wisata, namun tidak semua memiliki akses yang layak untuk dilalui. Hal ini tidak dijadikan hambatan dalam menarik wisatawan, malah memberikan atraksi penuh tantangan bagi wisatawan yang datang. Pemerintah daerah tidak menunggu anggaran pembangunan infrastruktur untuk membangun akses jalan ke lokasi wisata, namun memanfaatkan kekurangan tersebut sebagai atraksi wisata. Keempat, misteri yang diminati, destinasi wisata hutan yang kerap mendapat kesan mistis tidak perlu dikampanyekan untuk merubah kesannya menjadi positif.

Penasaran akan misteri wisata hutan tetap diminati oleh wisatawan, keyakinan tersebut membuat wisata hutan di kabupaten Banyuwangi tetap dilestarikan tanpa merubah kesan mistis yang ada. Kelima, pelayanan prioritas, menentukan prioritas pelayanan pada masyarakat miskin, lansia, disabilitas, dan pelaku usaha mikro untuk mendukung pembangunan daerah. Memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya, serta memberikan pelayanan terbaik bagi kaum rentan. Keenam, menyerang untuk bertahan, menyerang dalam hal pelayanan publik yakni memberikan pelayanan yang sangat baik sebelum adanya komplain dari masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan prioritas, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan berburu memberikan pelayanan sebelum adanya keluhan dari masyarakat. Dengan adanya Program Rantang Kasih untuk lansia, setiap hari para lansia dhuafa mendapatkan kiriman makanan siap saji secara gratis.

Gempita Perpus merupakan gerakan masyarakat pemberantas tributa dan pengangkatan murid putus sekolah. Garda Ampuh merupakan gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah. Dinas Kesehatan juga turut mendukung dengan adanya program Bumil Risti, yakni dengan memberikan pelayanan ekstra bagi ibu hamil beresiko tinggi. Ketujuh, preventif kesehatan, memberikan pelayanan preventif terhadap kesehatan masyarakat sebelum terjadi peningkatan pengobatan di pusat

pelayanan kesehatan. Untuk mengurangi jumlah masyarakat yang berobat ke rumah sakit, pemerintah daerah menjalankan program Mal Orang Sehat di setiap puskesmas sebagai langkah antisipasi kesehatan, masyarakat dapat melakukan *general chek-up*, konsultasi gizi, atau konsultasi psikologi.

Kedelapan, naturalisasi produk, menyikapi *high lifestyle* bagi kaum urban, produk organik menjadi semakin mahal di pasaran. Peningkatan perekonomian dari segi pertanian dan perkebunan, diarahkan pada penanaman produk-produk organik, agar mempunyai daya saing dalam menghadapi tren global saat ini. Terdapat 80 Ha lahan pertanian yang ditanami beras organik, didukung dengan mengeksport beras organik tersebut ke Amerika Serikat, Belanda, Cina, Qatar, dan Italia.

Tabel 01. Lokasi dan Alokasi BPM Program KOTAKU di Banyuwangi

NO	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Sisa Luas Kumuh (Ha)	Alokasi BPM 2019
1	Muncar	Blambangan	78,63	2.000.000.000
2	Muncar	Kedungrejo	2,75	1.000.000.000
3	Muncar	Kedungringin	31,18	1.000.000.000
4	Muncar	Tembokrejo	9,09	500.000.000
5	Muncar	Tambakrejo	41,19	2.000.000.000
6	Muncar	Sumbersewu	55,23	1.500.000.000
7	Banyuwangi	Karangrejo	19,39	1.000.000.000
8	Banyuwangi	Penganjuran	16,90	1.000.000.000
9	Banyuwangi	Singonegaran	8,74	1.000.000.000
10	Banyuwangi	Singotrunan	3,59	2.000.000.000
11	Banyuwangi	Tukangkayu	45,54	1.000.000.000
12	Banyuwangi	Panderejo	6,22	2.000.000.000
13	Banyuwangi	Sumberrejo	40,05	2.000.000.000
14	Banyuwangi	Kebalenan	33,93	2.000.000.000
15	Banyuwangi	Pakis	22,77	2.000.000.000
16	Banyuwangi	Kampung Melayu	6,16	2.000.000.000
17	Giri	Mojopanggung	21,94	2.000.000.000
18	Giri	Penataban	6,72	500.000.000
19	Giri	Boyolangu	65,60	1.000.000.000

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di setiap desa/kelurahan yang diintervensi oleh Program KOTAKU, didampingi oleh fasilitator untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan. Baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Pendataan kebutuhan pembangunan tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) yang dimiliki oleh setiap BKM. Dokumen RPLP tersebut disahkan oleh kepada desa/lurah dalam suatu forum lokakarya tingkat desa/kelurahan. Pendamping Program KOTAKU di tingkat kota/kabupaten melakukan advokasi pada

pemerintah daerah agar membentuk kelompok kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengkoordinir rencana penataan lingkungan permukiman di tingkat desa/kelurahan. Hasil koordinasi Pokja PKP ini tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).

Rumusan strategi, kebutuhan program, dan investasi dalam mewujudkan permukiman bebas kumuh mengacu pada Permen PU Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Besarnya kebutuhan dana dan permasalahan yang cukup kompleks, rencana dalam dokumen RP2KPKP ini lalu diusulkan untuk dijadikan prioritas penanganan melalui dana APBN dengan persetujuan Kepala Daerah. Program KOTAKU bersama Pokja PKP mengusulkan pada Kepala Daerah agar menerbitkan SK Walikota/Bupati tentang penanganan lokasi kumuh merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mendukung Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, diterbitkanlah SK Bupati Nomor 188/159/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kategori perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebut diatur dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya surat dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor PW.0901-CK/68 mengenai lokasi dan alokasi BPM Program KOTAKU sesuai dengan SK Bupati.

Realisasi penggunaan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat desa Tambakrejo sejalan dengan visi dan misi pemerintah desa Tambakrejo dalam mewujudkan prasarana dasar lingkungan yang layak, kegiatan pembangunan drainase, pemenuhan air bersih, dan jalan paving menjadi kegiatan utama pelaksanaan pemanfaatan dana BPM program KOTAKU di wilayah tersebut. Pemanfaatan dana sekitar 9,6% dari nilai BPM diluar biaya operasional BKM digunakan untuk kegiatan tematik jalur hijau, hal ini mendukung visi dan misi pemerintah desa serta pemerintah daerah dalam pengembangan potensi wisata. Mengenalkan komoditi buah jeruk di desa Tambakrejo, berpotensi sebagai wisata petik

jeruk dengan akses jalan yang sudah baik, hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Realisasi penggunaan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat kelurahan Sumberrejo apabila dihubungkan dengan pilar-pilar SDG's, pembangunan mengarah pada pilar *clean water and sanitation* dalam rangka menuju *good health and well-being*. Pembangunan jalur hijau mengacu pada visi kelurahan Sumberrejo mewujudkan kelurahan yang berbudaya tinggi, dengan mewujudkan pembangunan RTH bertemakan rumah adat, selain itu juga pembangunan drainase dilengkapi dengan koral sikat bermotif batik khas Banyuwangi. Dibalik pembangunan RTH ini, ada peran masyarakat yang merelakan tanah wakaf untuk dikelola agar menjadi daya tarik pengunjung dari luar daerah. Meningkatnya pengunjung dari luar daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berdagang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hubungan positif tersebut dapat dikatakan *partnerships for the goals* dalam pilar SDG's, dengan tujuan *decent work and economic growth*.

Realisasi penggunaan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat di kelurahan Tukangkayu berkontribusi dalam pembangunan drainase baru yang terhubung dengan sistem drainase perkotaan, hal ini mengurangi permasalahan banjir di lingkungan Stendo kelurahan Tukangkayu. Pembangunan jalan paving memberikan solusi pengerasan jalan terhadap masyarakat dengan mempertimbangkan resapan air. Kegiatan jalur hijau seiring dengan visi kelurahan Tukangkayu dalam mengedepankan kearifan budaya lokal, memberikan edukasi pada masyarakat tentang beragam jenis batik khas Banyuwangi. Pembangunan jalur hijau tematik batik khas Banyuwangi ini, turut mendukung visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan tempat wisata baru. Wisata edukasi bagi masyarakat lokal maupun luar daerah agar lebih mengenal tentang budaya kabupaten Banyuwangi.

Realisasi penggunaan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat Desa Tembokrejo berkonsentrasi pada penyelesaian permasalahan sanitasi, hal ini mengambil poin *clean water and sanitation* dalam pilar SDG's dalam upaya pembangunan pesisir pantai.

6. Penutup

Inovasi daerah erat kaitannya dengan kepemimpinan kepala daerah, yang berfungsi sebagai penggerak yang memotivasi adanya perubahan positif dengan adanya kerjasama antar pihak. Fungsi lainnya adalah kegiatan bekerjasama dalam merencanakan pembangunan, mendukung pelaksanaan dan pengawasan kegiatan hingga keberlanjutannya. Sinergitas pembangunan dengan adanya kolaborasi antar pihak dapat mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan menuju kesejahteraan. Saling berkontribusi terhadap pembangunan dapat menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif. Meski terdapat beberapa selisih pendanaan, namun pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah terakomodasi. Penelitian ini pun memberikan jawaban bahwa dana BPM program KOTAKU di Banyuwangi bersinergi mendukung perwujudan inovasi daerah, dan pelaksanaan program KOTAKU di Banyuwangi sudah cukup efektif.

Keterbatasan peneliti dalam melakukan riset ini diantaranya, peneliti tidak dapat melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan OPD kabupaten Banyuwangi karena sulitnya mengagendakan diskusi bersama pihak terkait. Jika hal ini dapat dilakukan, harapannya akan memberikan informasi yang lebih akurat dan detil mengenai ide-ide pengembangan inovasi daerah kabupaten Banyuwangi.

Daftar Pustaka

- Adikampana, I.M. 2017. *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Cetakan Pertama, Cakra Press. Denpasar, Bali.
- Bahrudin, Agus. 2017. *Inovasi Daerah Sektor Pariwisata*. ISSN. Vol. 1 Nomor 1.
- Chandrarin, G. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*, Salemba Empat: Jakarta.
- Dwiyanto K., Priyanti A. 2009. *Pengembangan Industri Peternakan Berbasis Sumber Daya Lokal*. Pengembangan Inovasi Pertanian: Bogor.
- Gunarso, Sofyan Siswanto. 2016. *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. <http://sinuapi.blogspot.com/2016/06/pariwisata-berbasis-masyarakat.html>. September, 5, 2020.
- Mirnasari, RM. 2013. *Inovasi Pelayanan Publik di UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih Kota Surabaya*. *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 2, pp. 34-44.

- Maqin A. 2011. Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika Journal*, Vol. 2, No. 1, pp. 12-25.
- Noor, I. 2013. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Universitas Brawijaya Press: Malang.
- Rasyid, A. F. I. 2020. *Jokowi Puji Layanan Terintegrasi dengan Desa dan Kecamatan*. Radar Banyuwangi, 01 Juli 2020. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2020/07/01/201920>
- Robinson, L. J., Marcelo, E. S., Sonqing, J. 2011. Social Capital and Then Distribution of Household Income in The United States: 1980, 1990, and 2000. *The Journal of Socio Economics*, 40.
- Sandriana N., Hakim A., & Saleh C. 2014. *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster di Kota Malang*. Reformasi. <http://jurnal.unitri.ac.id>.
- Scoones, I. 2009. Livelihoods Perspectives And Rural Development. *The Journal of Peasant Studies*.
- Sukmana, O. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing: Malang.
- Tabrani, Z. A. 2016. Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia. *International Journal of Government and Social Science*, Vol. 2, No. 1, pp. 56-62.
- Wati, K. S. 2015. Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita. <http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmsos/article/view/103/121>. Mei, 9, 2019.